

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL BANNA

Hasan Al-Banna di lahirkan pada 14 Oktober tahun 1906 di daerah Dhuha, desa Mahmudiyyah kawasan Buhairah Mesir. Daerah ini adalah sebuah perkampungan petani yang masih berpegang kuat kepada amalan dan nilai-nilai Islam. Hidupnya sejak kecil terpelihara dari pengaruh luar. Hasan Al Banna adalah anak sulung dari kedua orang tua yang berkebangsaan Mesir, tepatnya dari daerah Syamsirah Bindarfuh di wilayah Mudiriah Barat, yang sekarang dikenal dengan kota Kafr Asy-Syaikh.¹

Keluarga Hasan Al-Banna adalah keluarga Ulama dan dihormati oleh masyarakat setempat. Ayah Hasan Al Banna bernama Ahmad Abdurrahman Al Banna yang terkenal dengan gelar *As-Sa'atiy* (si tukang jam), karena profesinya sebagai tukang reparasi jam.² Ahmad adalah seorang ulama hadist dan ahli fiqh yang menyusun sanad-sanad Imam Empat (dalam bidang Hadist) menurut urutan bab-bab fiqh. Ahmad mengakui dirinya sebagai murid dari Muhammad Abduh.³

Ibu Hasan Al Banna adalah seorang perempuan terhormat bernama Ummu Sa'ad Ibrahim Shaqar. Ia adalah seorang wanita yang cerdas, pemimpin yang mempunyai wawasan tentang masa depan. Di sisi lain, Ummu Sa'ad mempunyai

¹ Abdul Aziz, Amin Jum'ah. 2005. *Tarikh Al Ikhwan Al Muslimun 1, masa pertumbuhan dan profil sang pendiri (Imam Syahid Hasan Al Banna)*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 169.

² Muhammad As-Sayid Al-Wakil, Kubra Al-Harakat Al-Islamiyah 13-14, dalam Abdul Aziz Jum'ah, 2005, hlm 170

³ *Ibid*, hlm 170.

sifat keras kepala yang sangat dominan. Sifat inilah yang menurun kepada Hasan Al Banna, namun sifat keras kepala ini kemudian berubah menjadi sifat keras kemauan dan tekad baja.⁴

Hasan Al Banna dibesarkan oleh keluarga yang terkenal dengan keilmuan dan agama, sehingga ia tampak istimewa dengan kekritisannya, *kewaraannya* dan *kezuhudannya*. Al Banna senantiasa melaksanakan shalat malam, puasa senin-kamis, dan menyelesaikan hafalan Al Qurannya pada *akil baligh*. Keprihatinan terhadap kondisi umat Islam terlihat jelas dalam wajahnya dan ia terdorong untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya sendiri.⁵

A. Pembentukan Intelektual dan Keilmuan

Jenjang akademik yang dilalui Hasan Al Banna adalah sebagai berikut:⁶

1. Madrasah Ar-Rasyad

Madrasah Ar-Rasyad adalah sekolah yang pertama kali dimasuki Hasan Al Banna. Al Banna memasukinya pada usia sekitar 8 tahun dan menjalaninya dalam waktu 4 tahun. Madrasah ini merupakan fondasi dasar, sebagai sandaran untuk melewati tahapan-tahapan belajar selanjutnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang cukup.⁷

Dalam Madrasah ini diajarkan materi hadist nabi dengan target hafalan setiap hari kamis, pelajaran *insya'* (mengarang), *qawa'id* (tata bahasa arab) dan

⁴ Al Banna Jamal,, Khithabat Hasan Al Banna Asy-Syab ila Abihi, hal. 22 dalam Abdul Aziz Jum'ah, 2005, hlm 170.

⁵ Fathi Yakan., 2002. *Revolusi Hasan Al Banna*. Jakarta: Harakah, hlm 3.

⁶ Abdul Aziz Jum'ah, 2005, *op.cit*, hlm. 180.

⁷ *Ibid*.

prakteknya, kesusastraan yang dikemas dalam pelajaran *muthala'ah* (bacaan/wacana) dan *imla'* (dikte), pelajaran *makhfuzhat* (hafalan kata-kata hikmah) berupa syair atau prosa. Bisa dikatakan madrasah ini adalah madrasah yang istimewa karena tidak satupun materi-materi seperti ini dikenal di madrasah-madrasah lain sejenisnya.⁸

2. Madrasah Al-I'dadiyah

Dalam madrasah ini Hasan Al Banna bergabung dengan organisasi anti kemaksiatan. Disamping itu Hasan Al Banna juga menjadi ketua organisasi sekolah yang bernama Perhimpunan Akhlak Mulia, yang berada dibawah pengawasan salah seorang guru Madrasah. Hasan Al Banna meneruskan belajarnya di madrasah ini selama dua tahun sampai dihapuskannya sistem Madrasah I'dadiyah lalu digantikan dengan sistem Madrasah Ibtidaiyah.⁹

3. Madrasah Al-Mu'alimin Al-Awwaliyah di Damanhur

Dengan dihapuskannya sistem Madrasah I'dadiyah dan berganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah maka tidak ada alternatif lain bagi para siswa kecuali harus memilih antara mendaftarkan diri ke Ma'had Diniy di Iskandariyah atau mendaftarkan ke Madrasah Mu'allimin Awwaliyah. Hasan Al Banna mengambil pilihan kedua. Al Banna melanjutkan ke Madrasah Al-

⁸ Hasan Al Banna, 2000, *Memoar Hasan Al Banna, Untuk Dakwah dan Para Dainya*. Surakarta : Era Intermedia, hlm 26.

⁹ Abdul Aziz, Jum'ah Amin, *op.cit*, hlm 184.

Mu'alimin Al-Awwaliyah di Damanhur untuk menyingkat waktu, karena setelah tiga tahun menempuh pelajaran disana dia akan menjadi guru. Pada masa ini merupakan fase transformasi dalam kehidupan Hasan Al Banna dari sisi keilmuan dan intelektual.¹⁰

Hari-hari di Madrasah Mu'allimin selama tiga tahun adalah hari-hari tenggelam dalam lautan tasawuf dan ibadah. Waktu-waktunya tidak pernah kosong dari belajar dan menambah ilmu diluar pelajaran-pelajaran yang telah ditentukan madrasah. Hal yang mendorongnya untuk terus belajar dan membaca adalah perpustakaan milik ayahnya serta motivasi dari para ustadz di Madrasah Mu'allimin. Kitab-kitab yang mempengaruhi Hasan Al Banna adalah Al-Anwar Al-Muhamadiyah karya Imam An-Nabahani, Mukhtashar Al-Mawahih Ad-Diniyah karya Imam Al-Qasthalani dan Nur Al-Yaqin Fi Sirah Sayid Al-Mursalin karya Syaikh Al-Khudari. Hasan Al Banna menempati urutan pertama di madrasah dan peringkat kelima di tingkat nasional ketika melaksanakan ujian kecakapan mengajar.¹¹

4. Universitas Darul Ulum di Kairo

Hasan Al Banna memutuskan melanjutkan ke Darul Ulum untuk menambah ilmu dan pengetahuan.¹² Di darul Ulum Al Banna merupakan mahasiswa yang paling berprestasi dan pada saat ujian akhir dia telah hafal

¹⁰ *Ibid*, hlm 186.

¹¹ Memoar Hasan Al Banna 2000, *op.cit*, hlm 60

¹² Hasan Al Banna. 2005. *Kumpulan Risalah Dakwah hasan Al Banna*. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, hlm 60.

17.000 bait syair dan kata-kata hikmah. Pada usia 21 tahun, Al Banna menyelesaikan studinya dengan yudisium terbaik pertama dan ditunjuk menjadi guru di Isma'iliyah.¹³

B. Latar Belakang Pemikiran Hasan Al Banna

1. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap Hasan Al Banna

Hasan Al Banna mempunyai hubungan yang luas dengan semua pemimpin aliran Islam yang hidup sejaman dengannya. Hasan Al Banna banyak dipengaruhi oleh mereka dan mereka pun banyak dipengaruhi oleh Al Banna.¹⁴ Tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Hasan Al Banna antara lain:

a. Ahmad Abdurrahman Al Banna

Ahmad Abdurrahman Al Banna adalah ayah Hasan Al Banna. Ia adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang hadist. Ahmad Abdurrahman mempunyai banyak karya tulis, diantaranya adalah *Al Fath Ar Rabbani fi Tartib Musnad Al -Imam Ibn Hambal Asy Syaibani*, *Al Qaul Al Hasan fi Syarb Bada'i Al Minan*, kemudian *Bada'i Al Minan fi Jam'i wa Tartib Musnad Asy Syafi'i wa As Sunan*.¹⁵

¹³ Fathi Yakan, *op.cit*, hlm 4.

¹⁴ Abdul Aziz, Jum'ah Amin, *op.cit*, hlm 227

¹⁵ Al-Mausu'ah Al Harakiyah dalam Badr Abdurrazaq Al-Mash, 2006, hlm 38.

Ia adalah seorang imam masjid serta pegawai resmi di desanya. Al Banna banyak belajar dari ayahnya yang mempunyai perpustakaan Islam yang cukup besar.¹⁶

b. Muhammad Zahran

Muhammad Zahran adalah seorang yang cerdas dan jenius, seorang alim yang bertakwa, yang tajam kemampuan berpikir dan humoris, yang cahaya ilmu dan keutamaannya memancar di tengah-tengah masyarakat. Ia adalah salah seorang ulama di Mahmudiyah yang mengajar anak-anak dan membimbing menghafal Al Quran. Ia juga mengajar khalayak umum di Masjid dan memberi pengajian kepada kaum wanita dirumah-rumah. Muhammad Zahran adalah pendiri Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyah karena didorong oleh cita-cita tinggi dan semangat keIslaman yang besar. Ia mendirikan Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyah dengan model seperti lembaga-lembaga pendidikan swasta yang telah tersebar luas didesa-desa pada waktu itu. Hasan Al Banna banyak belajar cara-cara mempengaruhi audiens dan berkomunikasi dengan para pengikut dan muridnya dari Muhammad Zahran.¹⁷

c. Muhammad Abu Syaasyah

Muhammad Abu Syaasyah adalah salah satu guru Hasan Al Banna yang cukup berpengaruh di Madrasah Ar-Rasyad Ad Diniyah. Ia sangat

¹⁶ Az Zirakli. *Al-A'lam dalam Badr Abdurrazaq Al-Mash*, 2006, hlm 38.

¹⁷ Anwar Al Jundi, 2003, hlm 28.

menaruh perhatian terhadap persoalan pendidikan dan pembentukan kader. Abu Syaasyah membantu penempatan pendidikan ruhani Hasan Al Banna.¹⁸

d. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha adalah murid Muhammad Abduh. Ia menjadi pimpinan penerbitan Majalah Al Manar. Majalah Al Manar senantiasa mewaspadai gerakan orang-orang atheis, liberalis dan statis di Mesir dan negara-negara lainnya. Al Banna Menganggap Majalah Al Manar telah membentuk madrasah pemikiran Islam yang didirikan atas kaidah-kaidah Ishlah Al-Islamiy (reformasi Islam) yang mulia (Abdul Aziz, Jum'ah Amin, 2005: 227).

e. Muhibuddin Al-Khatib

Muhibuddin Al-Khatib berasal dari Syiria setelah tinggal di Mesir, Ia aktif di bidang Jurnalistik, siaran dan dakwah untuk memperbaiki dan berjaga-jaga dari bahaya yang menimpa kaum muslimin. Al-Khatib memfokuskan dakwahnya dalam perbaikan dua segi yaitu jurnalistik dan pendidikan, juga perbaikan kurikulum pengajaran. Pada tahun 1343 H atau 1924 M, Al-Khatib menghidupkan kembali perpustakaan As-Shalafiyah dan mendirikan Percetakan As-Shalafiyah yang menerbitkan majalah Al-Fath.¹⁹ Al Banna mengenal Al Khatib saat kuliah di Darul Ulum, ketika mengunjungi perpustakaan As-Shalafiyah. Di Perpustakaan As-Shalafiyah inilah Al Banna

¹⁸ Anwar Al Jundi, 2003, *op.cit*, hlm 29.

¹⁹ Abdul Aziz Jum'ah, 2005, *op.cit*, hlm 227

banyak bertemu dengan banyak tokoh ulama seperti Rasyid Ridha, Mustafa Shabri, Muhammad Al-Khudhri Husain, Yusuf Ad-Dajawi dan Abdul Wahab An-Najjar.²⁰

f. Yusuf Ad-Dajawi

Yusuf Ad-Dajawi adalah seorang penulis Majalah *Al-Fath* yang sering dibaca oleh Hasan Al Banna. Ad Dajawi adalah seorang yang ramah, menarik dan berhati bersih sesuai dengan kehidupannya sebagai seorang sufi. Bersama Ad Dajawi, Hasan Al Banna membentuk perkumpulan *As Syuban Al Muslimun*.²¹

g. Muhammad Farid Wajdi

Muhammad Farid Wajdi (1295-1373H/1878-1954M) adalah salah satu pelopor pembaharuan pemikiran Islam, dengan metode pemahaman dan kritik pemikiran Barat. Farid Fajri adalah pemilik Majalah *Al-Hayah* dan ensiklopedi abad 20. Selain itu Ia juga memiliki banyak karangan dan beragam pendapat yang sering mengundang perdebatan dan beragam opini publik. Abdurrahman Al Banna (ayah Hasan Al Banna) mempunyai hubungan sangat dekat dengan Farid Wajri. Ketika Hasan Al Banna berada di Kairo, sering menemui Farid Wajri dirumahnya. Rumah Farid Wajri adalah

²⁰ *Ibid*, hlm 230

²¹ *Ibid*, hlm 232.

tempat berkumpulnya orang-orang terkenal dimasyarakat untuk mempelajari berbagai macam ilmu.²²

h. Thanthawi Jauhari

Thanthawi Jauhari adalah dosen di Universitas darul Ulum. Ia mengajar dalam jangka waktu yang cukup lama. Thanthawi Jauhari terkenal baik di Mesir maupun di luar Mesir. Banyak ulama dari negara-negara timur dan Barat diantaranya dari Amerika, Inggris dan Prancis menjadikan Thanthawi Jauhari sebagai tujuan utama dalam menimba ilmu. Thanthawi Jauhari diberi gelar *hakimul Islam* (orang bijak). Ia menulis berbagai macam buku, yang paling terkenal adalah tafsir Al Quran yang diberi nama "*Al Jawahhir*" yang mencapai kurang lebih 32 juz.²³

Thanthawi Jauhari melalui usaha-usaha intensif, berusaha meyakinkan bahwa Islam adalah agama rasional dan pembaharuan bukan agama kepasrahan dan *taklid*. Metode yang digunakan mengadopsi dari metode barat yang menyerang Islam, setelah didalami dan diambil manfaatnya. Thanthawi Jauhari menyeru kepada ulama dan para pemuda untuk mempertebal keyakinan keimanannya dengan mempelajari ilmu alam modern dan memotivasi mereka untuk menguasai cakrawala pengetahuan dan menganggapnya sebagai kewajiban syariat yang akan menyempurnakan

²² *Ibid*, hlm 232.

²³ *Ibid*, hlm 232

keimanan mereka, sehingga mereka layak diangkat sebagai khalifah Allah untuk memperbaiki bumi dan memberikan petunjuk bagi umat manusia.²⁴

i. Jamaluddin Al Afghani

Al Afghani adalah tokoh dunia Islam yang sangat terkenal sebagai pencetus Pan Islamisme.²⁵ Al Afghani datang ke Mesir pada tahun 1869 dan disambut oleh beberapa mahasiswa yang dipelopori oleh Muhammad Abduh. Buah pikiran Afghani yang menyebar saat itu adalah, bahwa penyakit yang paling penting dan mudah dilihat saat ini adalah kesewenang-wenangan dan kolonialisme. Untuk memerangi penyakit tersebut seluruh muslim wajib memiliki kesadaran politik sekaligus partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Menurut Afghani, masyarakat telah melakukan kesalahan besar jika memisahkan antara Islam dan politik. Islam adalah cara berpikir dan ideologi, yang mempunyai daya untuk berkata dan membebaskan muslim dari tindakan otoriter di kalangan mereka sendiri maupun dari penjajah asing.²⁶

Menurut Afghani, kaum muslimin harus melenyapkan praktek-praktek *kefasikan* dengan cara kembali kepada Al quran dan Sunnah. Selain itu juga harus menjaga persatuan, karena "tangan penjajah" selalu bekerja secara terang-terangan maupun tersembunyi untuk memecah belah persatuan umat. Metode perjuangan yang dilakukan oleh Afghani adalah dengan penguasaan lapangan dan saling melakukan hubungan, perkuliahan,

²⁴ Ibrahim al-Bayoumi Ghanim dalam Abdul Aziz Jum'ah, 2005, hlm 234

²⁵ *Almuzzammil Yusuf*, 2002, *op.cit*, hlm 30.

²⁶ *Ibid*, hlm 31.

publikasi, jurnal, pengorganisasian partai maupun group-group bahkan juga dengan memasuki dinas militer .

Ciri utama gagasannya adalah bahwa himbauannya tidak hanya ditujukan kepada sebuah komunitas muslim disatu negara, melainkan kepada seluruh muslim didunia. Ia menghimbau bersatunya kaum muslimin sedunia dalam satu tatanan pengorganisasian, untuk menghadapi otoritarianisme dan kolonialisme serta menggunakan metode provokasi. Afghani menempatkan dirinya sebagai politisi dan diplomat.²⁷

j. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh adalah guru ayahnya, Abdurrahman Al Banna. Abduh mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum agama, pengembangan pemikiran agama pada prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunah, mengeluarkan ijtihad untuk menjawab tuntutan jaman.²⁸ Abduh menganjurkan perubahan secara evolusi dan mengarahkan pembicaraannya kepada masyarakat Mesir. Muhammad Abduh lebih dikenal sebagai konseptor pendidikan Islami. Konsep pendidikan Abduh ini kemudian dilanjutkan oleh murid utamanya yaitu Rasyid Ridha, dan dalam pengajian-pengajian Rasyid Ridha, Al Banna kerap menghadirinya.²⁹

²⁷ *Ibid*, hlm 32

²⁸ *Ibid*, hlm 32

²⁹ Maududi dalam Yusuf, *Almuzzammil*.2002, hlm 33

Abduh memiliki banyak murid diantaranya adalah Farid Wajri, Musthafa Al-Maraghi dan Ahmad Taimun yang dijadikan rujukan oleh Hasan Al Banna..³⁰

Muhammad Abduh menganjurkan agar umat Islam jangan terlampau teguh memegang legalisme (memegang teguh perkataan dan tidak mengutamakan ijihad), tetapi merumuskan ajaran Islam dengan alam pikiran modern. Pendidikan Islam yang bernilai tinggi harus diutamakan.³¹

Hubungan pemikiran Al Banna dengan pendidikan Muhammad Abduh dapat terlihat dari sikap mereka berdua terhadap hal yang bersifat umum dan mendasar. Salah satunya adalah pendapat mereka terhadap pengerahan segala urusan untuk menyebarkan Islam kepada seluruh pengikutnya dan mengkhususkan pada hal-hal yang bersifat primer dan asasi saja, dimana hal itu bisa mencegah perselisihan dan perbedaan pendapat yang menghancurkan dan menjauhkan semua *fiqrah* (pemikiran) dan mahzab yang ada. Pola pendidikan mereka berdua juga berkeyakinan bahwa tidak akan mungkin terjadi perubahan dalam masyarakat Islam sebelum pola pikir kaum muslim sendiri berubah. Selain itu, suatu kemajuan juga tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya perbaikan *tarbiyah* (pendidikan). Mereka berpendapat bahwa hendaknya proses perbaikan ini berasal dari diri Islam sendiri, yakni

³⁰ Richad Mitchell, dalam Abdul Aziz Jumuah, 2005, *op. cit*, hlm 132.

³¹ Soebantardjo, 1958, *op. cit*, hlm 155.

bersumber dari ajaran-ajaran dan berjalan seiring dengan perintah-perintahnya dan logika harokahnya.³²

Hasan Al Banna menjalin hubungan yang sangat erat dengan para ulama dan tokoh cendekiawan di tengah-tengah masyarakat. Sangat dimungkinkan tokoh-tokoh tersebut memberikan pengaruh pada diri Hasan Al Banna baik secara langsung ataupun tidak. Hasan Al Banna tidak segan untuk menerima, menolak, membenarkan atau bahkan mengkritik sesuai dengan pemikiran, metode dan dakwahnya.³³

2. Kondisi Sosial Politik Mesir

Faktor lain yang mempengaruhi pemikiran Hasan Al Banna terutama kondisi pemerintahan Mesir pada tahun 1922 sampai 1952. Pada masa ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Al Banna dan perkembangan organisasi yang didibentuknya yaitu Ikhwanul Muslimin berupa:³⁴

1. Kekuatan dan faktor politik.

Kekuatan politik yang berpengaruh dan berdampak dalam masyarakat Mesir ada empat, yaitu pemerintahan Inggris, raja-raja, partai-partai dan kekuatan massa. Berikut dijelaskan kekuatan dan faktor politik yang berpengaruh tersebut:

³² Richad Mitchell, dalam Abdul Aziz Jum'ah, 2005, hlm 133.

³³ Abdul Aziz Jum'ah, 2005, *op.cit*, hlm 235.

³⁴ Ruslan Mu'iz, Abdul Utsman. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 143.

a. Inggris

- 1). Sejak menduduki Mesir pada 14 September 1882, Inggris melakukan dominasi terhadap segala sistem masyarakat dan mengokohkan pijakannya. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghadirkan militer dan melakukan pendudukan ekonomi, politik, budaya dan pendidikan. Pada tahun 1919 terjadi revolusi untuk meraih kemerdekaan politik seutuhnya, yang menghasilkan beberapa hal positif seperti berakhirnya proteksi Inggris terhadap Mesir dan Mesir menjadi negara merdeka yang mempunyai supremasi berdasarkan Proklamasi 28 Februari 1922. Meskipun Inggris menuntut syarat untuk menguasai empat hal secara mutlak. Keempat hal tersebut adalah: jaminan yang melegitimasi Inggris untuk melakukan intervensi dalam segala persoalan internal Mesir; jaminan tentara Inggris tetap berada di Mesir (yang menjadikan kemerdekaan Mesir hanya sekedar formalitas); penguasaan Inggris atas tentara dan polisi Mesir; dan penguasaan ekonomi atas Terusan Suez dan Bank Negara. Inggris terus menerus melakukan intervensi dalam segala persoalan internal Mesir, seperti yang dilakukan oleh E.Lloyd, Komisaris Tinggi Inggris, terhadap kabinet Nuhas pada tahun 1928, yang memaksanya agar menerima kesepakatan dengan Inggris. Hal inilah yang menyebabkan deposisi kabinet Nuhas. Intervensi Inggris juga sangat mencolok pada masa pemerintahan Husain Siri tahun 1933, Deklarasi

Hour bahwa pemerintahannya menentang dikembalikannya konstitusi 1923 dengan alasan bahwa konstitusi tersebut tidak *applicable*. Inggris menguatkan legalitas kependudukannya atas Mesir dengan melakukan perjanjian 1936 dengan Nuhas, sebagai konsekuensinya adalah seluruh pelabuhan Mesir dalam Perang Dunia II di bawah kekuasaan Inggris. Intervensi ini mencapai puncaknya pada Februari 1942, ketika Inggris mengepung istana Faruq dengan panser-panser untuk memaksanya membentuk kabinet di bawah pimpinan Nuhas. Kenyataan-kenyataan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Mesir belum menjadi negara merdeka yang mempunyai kedaulatan. Sebaliknya, kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan delegasi Inggris.

- 2). Imperealisme Inggris dan segala kondisi yang dilahirkannya merupakan faktor langsung bagi pertumbuhan dan pengkondisian Ikhwanul Muslimin. Mengingat bahwa keberadaan Inggris saja sudah cukup untuk membangkitkan perasaan-perasaan keagamaan orang-orang Mesir yang mendorong mereka untuk menentang segala hal yang muncul dari penjajahan tersebut.

Hasan Al Banna menyebutkan bahwa keberadaan tentara Inggris di Isma'ilia, tempat tumbuhnya Ikhwanul Muslimin telah membangkitkan kesedihan dalam jiwa setiap warga dan mendorongnya untuk memperhitungkan pendudukan asing ini. Pendudukan Inggris dengan

segala tindakannya telah mempengaruhi jiwanya dan menjadi inspirasi yang memiliki pengaruh besar terhadap dakwah dan dainya.³⁵Latar belakang inilah yang membawa semangat kepada Al Banna dan Ikhwanul Muslimin untuk membawa Mesir ke arah yang lebih baik dan menuju kepada kemuliaan umat.

Disamping itu, penjajahan Inggris juga mempengaruhi tujuan-tujuan mereka. Ikhwanul Muslimin berpendapat bahwa mustahil ditegakkan pemerintahan yang baik selama penjajahan masih ada dan menjerat pemerintah Mesir. Ikhwanul Muslimin memasukkan usaha melawan imperealisme dan membebaskan tanah air dari segala yang merusakkannya dalam program mereka, agar dengan kebebasan itu umat dan pemerintahan dapat meraih kejayaannya. Imperealisme juga berpengaruh terhadap cara-cara pembentukan pasukan khusus untuk berjihad melawan Inggris. Keberadaannya di Mesir merupakan faktor langsung yang menyebabkan Ikhwanul Muslimin mendiskusikan makna imperealisme, makna kemerdekaan sekaligus sarana-sarananya.

b. Raja

Meskipun Inggris telah memasuki masa diberlakukannya sistem parlementer berdasarkan konstitusi 1923, akan tetapi Raja Fuad dan kemudian Raja Faruq menetapkan diktatorisme semi absolut di Mesir, dengan berdasar kepada dua faktor:

³⁵ Al Banna, *Mudzakirat ad-da'wah wa daiyah*, 2000, hlm 75-76

- a). Konstitusi 23 yang memberikan hak kepada raja untuk membubarkan majelis perwakilan secara mutlak, menanggukhan pengangkatannya, menentukan perdana menteri, juga melarang pengangkatan menteri yang tidak disetujuinya. Disamping itu, raja juga berhak melawrang terbitnya undang-undang yang tidak disetujuinya, menentukan seperlima anggota senat, dsb.
- b). Partai-partai minoritas yang bertumpu sepenuhnya kepada raja untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga raja memanfaatkannya untuk menekan kehidupan perwakilan dan memandulkan konstitusi. Dengan demikian raja adalah sumber kekuasaan riil di mesir sebelum tahun 1952.

c. Partai-Partai

- 1). Politik Inggris waktu itu (sebagaimana disebutkan oleh Cromr) bertujuan mengikat Mesir dengan Inggris dan mengkondisikan Mesir untuk menerima dengan rela menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan Inggris, tanpa kekerasan, tanpa melakukan tindakan-tindakan kasar, akan tetapi dengan cara yang halus.

Politik ini berhasil dengan wujud bahwa kekuasaan Inggris atas Mesir tidak dalam perlindungan dan kontrol langsung, akan tetapi dalam bentuk intervensi Inggris. Bentuk intervensi ini adalah dengan cara mengatur komposisi pemerintahan dan administrasi Mesir dengan sistem

yang menjamin kekuasaannya melalui sistem yang menyibukkan orang-orang Mesir sendiri. Sejalan dengan itu lahirlah Deklarasi 1922 dan Konstitusi 1923. Adanya sebuah kepastian bahwa proses aktivitas yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan politik dalam negeri dipusatkan di parlemen, sementara hubungan dengan Inggris terkait dengan jaminan diatas terbatas pada negosiasi-negosiasi damai. Sejalan dengan itu semua, diterapkanlah sistem demokrasi liberal pada tataran implementasi. Kemudian mulailah berbagai aktivitas partai mengarah pada tiga orientasi dilihat dari ukuran dan sandarannya, yaitu partai rakyat mayoritas (yakni partai wafd) dan partai-partai pecahannya yang disebut sebagai partai-partai rakyat minoritas, partai-partai istana (partai *asy-syab*) disamping Partai Nasional (*Al Hizb Al wathani*)

2). Partai-partai tersebut selain partai Nasional mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

- a). Penguasaan para pejabat dan konglomerat atasnya. Hal ini sangat jelas pada partai-partai minoritas dan Partai Wafd setelah tahun 1936, setelah dimasuki oleh kaum feodal, dan tujuannya pun mulai menyimpang kepada sekedar meraih kekuasaan.
- b). Kesibukannya dengan permainan kekuasaan dan pemilu. Hal ini menyebabkan berbagai potensi bangsa Mesir tercurahkan untuk

sesuatu yang bukan pada tempatnya, yang mestinya dapat dialokasikan untuk mewujudkan kemerdekaan.

- c). Kungkungan imperealisme terhadap seluruh partai, selain Partai Nasional dilihat dari kerelaannya menjadi pelayan bagi hukum positif dan sistem liberal yang didasarkan atas kekaguman terhadap idealisme barat yang sekuler dengan cara hidupnya, sehingga dapat dikatakan bahwa semua partai itu mewakili arus pemikiran asing, yaitu pemikiran penjajahan asing itu sendiri.
- d). Semua menerima negosiasi dengan penjajah. Mereka mengubah format konflik dengannya, dari revolusi rakyat melawan agresor dan “pencuri”, menjadi negosiasi-negosiasi para politikus dengan kekuatan imperealis yang secara ideologis tidak bertentangan dengan mereka.
- e). Pembentukan partai-partai minoritas tidak memiliki alasan apapun selain upaya untuk meraih kekuasaan. Karenanya tidak ada perbedaan prinsipil apapun antara partai-partai itu, yaitu mereka tidak mempunyai satu program kerja pun yang diperjuangkan untuk direalisasikan. Akibatnya mereka melakukan pemalsuan kehidupan parlementer dengan bermain curang dalam pemilu dan sebagainya dan merusak kehidupan Mesir. Hal ini terjadi akibat raja memanfaatkannya untuk melakukan kudeta-kudeta konstitusional dan menutup kebebasan.

Akibat perebutan kekuasaan oleh partai-partai itu maka periode 1922-1952 lahir sejumlah kabinet, mencapai 41 kabinet. Bahkan Departemen Pendidikan pada masa itu dijabat oleh 59 menteri. Semua ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pemerintahan.

- 3). Kondisi partai-partai yang ada di Mesir saat itu telah mempengaruhi pertumbuhan Ikhwanul Muslimin berupa:
 - a). Sebenarnya partai-partai tersebut tidak bertitik tolak dari pemikiran warisan Mesir, tetapi ditumbuhkan oleh liberalisme barat, berupa pemikiran impereal. Dari latar belakang itu, para pembela arus keagamaan yang melemah di awal periode ini, tidak mampu lagi melawan kelompok-kelompok pemikiran asing. Kelahiran Ikhwanul Muslimin merupakan jawaban atas berbagai tantangan itu.
 - b). Hasan Al Banna menyebutkan bahwa berbagai kondisi pemerintahan dan cara-cara menjalankan kekuasaannya banyak berbenturan dengan Ikhwanul Muslimin. Dengan dasar hal tersebut, Ikhwanul Muslimin memasukkan ke dalam programnya, usaha untuk mereformasi pemerintahan. Dengan melihat kondisi kepartaian dan orientasi kebarat-baratannya maka sebelum tahun 1952, Ikhwanul Muslimin menjadikan diantara tujuan mereka adalah "melebur seluruh partai dan menyatukan kekuatan-kekuatan umat dalam satu orientasi yang memiliki program Islami".

c). Al-Bisyri menyebutkan bahwa kegagalan berbagai partai ini dalam mewujudkan cita-cita yang diharapkan, berupa pembebasan diri dari penjajahan, meruntuhkan kesewenang-wenangan, dan kesejahteraan ekonomi telah memberikan kontribusi dalam mengokohkan arus politik Islam dan membangkitkan perasaan-perasaan keIslaman secara efektif, khususnya pada tahun tiga puluhan. Satu hal yang memperluas cakupan basis massa arus ini.³⁶

d. Kekuatan Massa

Penopang utama kekuatan massa ini adalah mahasiswa, kaum pekerja, dan para pegawai.³⁷ Kekuatan ini tampak nyata pada Revolusi 1919 dan sesudahnya. Kekuatan ini menyadari akan hak-haknya dan sangat serius menuntutnya dalam bentuk aksi dan demonstrasi, akan tetapi belum memiliki organisasi politik nasional yang mempunyai program-program yang sejalan dengan identitas dan ideologinya. Lalu muncullah berbagai partai yang menjadikan otoritas hanya pada para pemimpin politik, bukan kepada rakyat.

Partai-partai minoritas tidak memiliki orientasi kepada rakyat sedikitpun. Selain itu, massa pun mulai berpaling dari Partai Wafd sesudah terjadinya kesepakatan 1963 dengan penjajah. Mereka mulai melirik "kepemimpinan baru dan organisasi politik selain Al-Wafd". Ketika itu Ikhwanul Muslimin telah masuk kedalam kancah politik Mesir dengan

³⁶ Dalam Muiz Ruslan 2000, hlm 150.

³⁷ Mahmud Abdul Halim dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 150

membawa orientasi kerakyatan yang asli dan berpihak kepada para pekerja serta tuntutan-tuntutan nasional. Karenanya kaum buruh, mahasiswa dan kalangan intelektual yang kecewa terhadap politik Wafd dan politik partai-partai minoritas kemudian bergabung kepada Ikhwanul Muslimin. Hal ini pula yang menyebabkan semakin luasnya basis Ikhwanul Muslimin.³⁸

Beberapa realitas yang terjadi saat itu adalah sebagai berikut:

- a). Anggota Ikhwanul Muslimin mendapat pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik yang aktif di Mesir, baik sebagai penyebab langsung pertumbuhannya seperti keberadaan Inggris dan berbagai partai maupun sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya, dari segi tujuan, pemikiran dan bentuknya.
- b). Pada saat itu terlihat jelas bahwa sistem pemerintahan Islam dan asas-asasnya tidak ada. kemudian ditambah lagi dengan dihapuskannya Khilafah Islamiyah secara total pada tahun 1924, yang memberi dampak sangat besar di Mesir, maka kesimpulannya adalah , “negara Islam yang merdeka (berdaulat) dan pemerintahan Islam membutuhkan orang-orang yang berusaha untuk mengembalikannya”. Kondisi ini merupakan penyebab utama bagi pertumbuhan dan perkembangan Ikhwanul Muslimin.
- c). Terdapat tiga masalah politik yang menonjol yaitu pembebasan dari imperealisme, pemerintahan Islam dan kebebasan. Masalah tersebut harus

³⁸ Ishaq Al-Husaini dalam Muiz Ruslan, 2000, op.cit, hlm 150.

diselesaikan dengan cara penyadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tujuan membangkitkan partisipasi politik masyarakat untuk memperbaiki kondisi di Mesir.³⁹

2. Kekuatan dan Faktor-faktor Sosial Ekonomi

a. Kekuatan-kekuatan Sosial

1. Masyarakat Mesir pada masa itu terdiri dari tiga golongan yaitu:

- a) Golongan tuan tanah dan para pemilik real estate di kota-kota. Pada periode antara 1919 hingga 1952, 0,5 persen dari jumlah keseluruhan tuan tanah memiliki 33,9 persen hingga 35,2 persen tanah pertanian, yang mereka garap untuk menambah kekayaan mereka. Kekayaan yang besar ini merupakan modal kekuasaan politik mereka. Masing-masing pemimpin partai dan para politikus berafiliasi kepada kelompok yang menikmati banyak fasilitas ini.
- b) Mayoritas rakyat, yang terdiri dari kaum tani, buruh-buruh pertanian, pekerja kasar dan sebagainya. Pada tahun 1945, jumlah penduduk pedesaan dan yang bekerja di sektor pertanian mendekati 12 juta jiwa, 70 persen dari mereka tidak memiliki selain 13 persen tanah pertanian dan itu pun hanya sebanyak 5 qirath (1 qirath = 4/6 dinar) untuk tiap individu. Satu juta diantara mereka adalah buruh tani nomaden, tidak mempunyai apa-apa. Pada tahun 1946, jumlah

³⁹ Ahlam Muhammad dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 151

buruh pertanian dan penduduk pedesaan mencapai 15 juta jiwa, dan apabila dirata-rata, setiap individu mempunyai 1/5 acre (1 acre = 0,4646ha). Presentase buruh di kota terus bertambah sehingga jumlah mereka mencapai 1 juta jiwa pada tahun 1948.

- c) Mayoritas masyarakat itu mengalami berbagai kesengsaraan hidup, penyakit, tidak memperoleh pendidikan, dan hanya dieksploitasi. Ini semua menunjukkan betapa rusaknya sistem sosial yang ada ketika itu, munculnya sistem kelas, dan tidak adanya keadilan sosial.⁴⁰
- d) Kaum intelektual, yang terdiri dari kalangan profesional, pegawai dan mahasiswa.
- e) Ikhwanul Muslimin tumbuh ditengah kaum buruh Isma'iliyah. Kaum buruhlah yang mendesak Hasan Al Banna untuk membentuk sebuah organisasi yang berusaha membebaskan dari kezaliman dan kesengsaraan yang dirasakan kaum buruh.⁴¹

Dengan alasan itulah Ikhwanul Muslimin menjadikan salah satu tujuan dalam kegiatannya adalah mewujudkan keadilan sosial dan jaminan sosial bagi setiap warga negara, memberantas kebodohan, penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Dalam menghadapi persoalan keadilan sosial dan pertentangan kelas, Ikhwanul Muslimin menggunakan cara teorisasi pemikiran dan penyadaran. Ikhwanul Muslimin juga memberikan perhatian

⁴⁰ Al Banna, *Risalah al-Mu'tamar As-Saadis hal 15-22 dalam Muiz Ruslan, 2000, op.cit, hlm 152*

⁴¹ Memoar Hasan Al Banna, dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 152

kepada persoalan-persoalan tenaga kerja dan petani, sehingga Ikhwanul Muslimin mendirikan Departemen Tenaga kerja dan Petani di kantor Pusatnya.

b. Kondisi Sosial

Karena berbagai faktor, muncullah tiga kondisi sosial dan moral yang menjadi penyebab langsung pertumbuhan Ikhwanul Muslimin, yaitu:

1. Aktivasi gerakan kristenisasi yang membonceng imperealisme dan mengeksploitasi rendahnya tingkat kehidupan mayoritas masyarakat Mesir. Manuver-manuver mereka semakin meningkat sebelum kelahiran Ikhwanul Muslimin, hingga membakar nurani keagamaan Mesir. Hal ini yang mempengaruhi Hasan Al Banna untuk mendirikan sebuah organisasi untuk melawan misionaris tersebut.⁴²
2. Perempuan tidak berkerudung dan berbaur dengan kaum lelaki
3. Munculnya gelombang dekadensi moral dan degradasi sosial dengan semakin menjamurnya tempat-tempat prostitusi terbuka, *dance hall*, perang, bahkan berontak terhadap tradisi-tradisi yang bersumber pada agama, maraknya propaganda agar seluruh penampilan masyarakat Mesir seperti Eropa, propaganda permisifisme, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena ini telah mengusarkan publik Islam, dan mengusik Hasan Al Banna sehingga ia mengatakan "pelupuk mataku tak menemukan cara untuk tidur, karena risau yang teramat dalam memikirkan kondisi ini.

⁴² Mumammad Husain Haikal dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 153.

Akupun bertekad untuk melakukan langkah yang positif.”⁴³

Kondisi ini juga berdampak pada proses adaptasi dan perkembangan Ikhwanul Muslimin. Secara intelektual, mereka memperhatikan problema perempuan. Didirikanlah Divisi Akhwat Muslimah, untuk memberikan perhatian terhadap problematika mereka, disamping untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kependidikan mereka. Mereka berusaha melawan kristenisasi dengan berbagai cara, mendirikan Divisi Sosial dan Pelayanan untuk kaum fakir miskin, mendirikan kamp-kamp pengungsian, memberikan perhatian terhadap moral dan lain-lain.

c. Kondisi Perekonomian

Meskipun ada perkembangan industri di Mesir sejak revolusi 1919, namun hanya terbatas pada sektor-sektor konsumtif yang tidak mampu menyedot modal asing. Secara umum, kondisi perekonomian ketika itu adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Tetap berlangsungnya monopoli-monopoli perusahaan-perusahaan asing. Hasan Al Banna menyebutkan bahwa pada tahun 1938, di Mesir terdapat 320 perusahaan asing yang mengeksploitasi seluruh kebutuhan hidup di Mesir, bersaing hanya dengan 11 perusahaan dalam negeri.
2. Keterikatan ekonomi Mesir dengan ekonomi Inggris. Mata uang Mesir tergantung kepada obligasi kantor keuangan Inggris, badan percetakan uang

⁴³ Al Banna dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 153.

⁴⁴ Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 154

Inggris, dan Bank Nasional yang sebenarnya adalah bank asing.

3. Ketergantungan ekonomi Mesir kepada pertanian, dengan hanya mengandalkan satu produknya yaitu kapas, saat kondisi pedesaan mengarah kepada sentralisasi kepemilikan lahan pertanian hanya ditangan sekelompok kecil masyarakat, yang enggan menggunakan teknologi konvensional dalam pertanian
4. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penjajahan ekonomi, keterbelakangan ekonomi, rendahnya tingkat hidup hingga derajat yang sangat rendah, dan ancaman pengangguran yang selalu mengintai para pekerja.

Kondisi berikut juga memberikan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan Ikhwanul Muslimin :

1. Dominasi perusahaan terusan suez oleh Inggris dan orang-orang asing lainnya di Isma'ilia, dan tertindasnya kaum buruh Mesir, memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi Hasan Al Banna dan perjuangannya. Ini merupakan faktor sekunder bagi lahirnya Ikhwanul Muslimin.
2. Mitchell menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan penyebab kuat masuknya Ikhwanul Muslimin ke sektor ekonomi dan partisipasi mereka dalam kebangkitan ekonomi Mesir.
3. Para pemikir Ikhwanul Muslimin membahas masalah kemerdekaan dan kebangkitan ekonomi untuk menghadapi kondisi tersebut. Tujuan mereka

adalah mendirikan sistem perekonomian yang independen.

Dengan berpijak pada realita yang ada, Abdul Muiz Ruslan dalam Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbagai kekuatan dan faktor sosial ekonomi yang dominan di Mesir, merupakan penyebab langsung tumbuhnya Ikhwanul Muslimin. Anggota Ikhwanul Muslimin mengalami perkembangan karena interaksi ini, hal ini terlihat dari jawaban-jawaban yang diberikan atas tantangan-tantangan kondisi tersebut melalui ijtihad-ijtihad pemikiran dan ilmiah yang didasarkan kepada Islam.
2. Berdasarkan analisis kondisi tersebut, jelaslah bahwa sistem sosial ekonomi Islam ketika itu tidak ada di Mesir. Oleh sebab itu mencuatlah masalah keadilan sosial dan pembangunan sistem ekonomi independen berdasar Islam di kalangan Ikhwanul Muslimin.
3. Kekuatan dan Faktor-faktor Kultural

Dimasa pertumbuhan dan perkembangan Ikhwanul Muslimin, terdapat berbagai arus nilai yang berpengaruh diantaranya adalah:

a. Arus Reformasi Keagamaan

1. Dakwah kaum Muwahhidin (Wahhabi) terhitung sebagai langkah awal pembaharuan (*tajdid*) di abad modern, dalam rangka mengembalikan Islam sebagaimana yang dijalankan oleh kaum salaf. Dakwah ini

dipengaruhi oleh langkah-langkah Ibnu Taimiyah. Mereka yakin bahwa satu-satunya penyebab kejatuhan kaum muslimin adalah kerusakan aqidah. Menurut kaum ini, tidak ada jalan lain kecuali umat harus kembali kepada tauhid yang *shahih*, sekaligus menghancurkan segala *bid'ah* dan *khurafat*. Pengokohan aqidah dan akhlak sebagaimana digariskan agama adalah hal yang sangat diprioritaskan, tetapi masalah-masalah kontemporer dan tuntutan-tuntutannya tidak diperhatikan dan mereka tidak berusaha meningkatkan kehidupan intelektual, kecuali pada lingkup “ilmu-ilmu diniyah” saja.⁴⁵

2. Setelah pemerintahan wahhabi jatuh, muncullah Jamaludin Al – Afghani dengan gerakan yang lebih modern. Al Afghani datang dari sebuah masyarakat yang mencapai puncak degradasi, sementara pada waktu yang sama imperealisme mulai mencengkeramkan kakinya di atas bumi Mesir. Tujuan dari langkah-langkah Al-Afghani saat itu adalah:

Pertama, merobohkan pilar-pilar sistem pemerintahan yang ada ketika itu, agar bisa mengembalikan sistem politik di dunia Islam berdasarkan ukhuwah islamiyah yang telah dicabik-cabik oleh imperealis.

Kedua, memerangi paham materealisme yang diyakini sebagai pengaruh tersembunyi pemikiran Barat

⁴⁵ Sa'id Ismail Ali dalam Muis Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 156

Ketiga, melawan pengaruh asing, membangkitkan ajaran-ajaran Al Quran di tengah masyarakat luas, membangun jiwa mulia di antara kaum muslimin, dan menyadarkan akan hak mereka untuk menikmati kebebasan.⁴⁶

3. Kemudian datanglah Muhammad Abduh, murid Jamaludin. Muhammad Abduh yang melihat masalah reformasi sebagai masalah tersendiri, tidak melihatnya dalam konteks politik. Pernyataan ini dengan keyakinan agar reformasi bisa terwujud, dan langkah pertama harus dimulai dari individu.

Dengan demikian Muhammad Abduh telah memindahkan gerakan kembali kepada Islam melalui sebuah aktivitas politik, ke aktivitas edukatif kultural dengan prinsip bahwa pendidikan itulah asas semua gerakan reformasi, dan bahwa pembinaan generasi baru itulah yang akan mewujudkan kebangkitan.⁴⁷

4. Sekalipun gerakan Muhammad Abduh berhasil menghapus kemandegan intelektual, namun gejolak kebangkitan Islam masih belum memberikan perhatiannya kepada realitas sosial. Bahkan belum mampu mengubah jiwa keIslaman, dan tidak juga mampu menterjemahkan fungsi sosial agama ke dalam bahasa nyata.

⁴⁶ Malik bin Nabi dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 157

⁴⁷ *Ibid*, hlm 157

5. Sebelum Perang Dunia I sebelum munculnya Ikhwanul Muslimin, arus pergerakan telah mengkristal pada murid-murid Muhammad Abduh yang tetap aktif di tengah masyarakat Mesir. Akan tetapi imperialis Inggris melakukan intervensi demi kepentingan westernisasi. Dengan berakhirnya Perang Dunia I (tahun 1918), arus westernisasi liberal mendapat kemenangan dalam bidang politik dan pemikiran di Mesir, ditopang oleh pengaruh imperialis.
6. Hasan Al Banna tumbuh saat arus (reformasi keagamaan) ini melemah. Kemudian Al Banna mempelajari dan terpengaruh olehnya, serta mengambil kelebihan dari metode Jamaludin dalam aktivitas politiknya, dan metode Muhammad Abduh dalam perhatian terhadap pendidikan. Hasan Al Banna mencoba melanjutkan perjuangan mereka. Faktor yang mendorong Al Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin adalah kelemahan dan ketidakmampuan tokoh-tokoh sebelumnya dalam melakukan perbaikan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan perpanjangan dari warisan pergerakan sebelumnya.⁴⁸

b. Arus Westernisasi Liberal

Yang dimaksud dengan westernisasi adalah keharusan menjadikan Barat peradaban sebagai sumber mata air yang harus ditimba oleh peradaban Arab modern, yang tidak ada sumber selainnya.

⁴⁸ Muhammad Husain, Anwar Jundi dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 157

Arus ini telah meresap melalui berbagai macam terobosan ke Mesir, kemudian datanglah imperealisme Inggris yang kemudian menopangnya dan *mensupport* sebagian pemikir yang mencontoh cara-cara kehidupan Barat.⁴⁹

Sebelum dan sesudah kelahiran Ikhwanul Muslimin, jaringan pemikiran westernisasi di Mesir terwakili dalam:

1. Konfederasi Mesir

Hasan Al Banna menyebutkan bahwa kajian ilmiah dan kehidupan akademis, setelah tahun 1925 memberikan gambaran kepada kebanyakan orang bahwa konfederasi tersebut tidak akan menjadi sekuler, kecuali jika ia memberontak terhadap agama, dan didorong oleh pemikiran materialisme yang diambil dari Barat seutuhnya.

2. Sekolah-sekolah misi asing yang dijalankan sesuai dengan sistem pengajaran Barat berusaha menyebarkan kebudayaan Barat dan membangun generasi yang memiliki loyalitas dan tunduk kepadanya.

3. Munculnya pemikir dan penulis. Yang paling menonjol diantara mereka ada tiga orang yaitu:

Pertama, Salamah Musa, dalam bukunya *Al yaum wa Al-Ghadd* (terbit tahun 1927). Ia menyebutkan bahwa tujuan-tujuannya adalah kebebasan perempuan sebagaimana yang dipahami oleh Eropa. Kultur dan pengajarannya harus sesuai dengan Eropa, tidak ada otoritas agama terhadapnya, pemerintahan harus benar-benar sebagaimana yang ada di

⁴⁹ Muhammad Al Hadi Afifi dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 158

Eropa, dan setiap orang yang berusaha menjadikannya sebagai pemerintahan agama harus diberi sanksi, menggugurkan syariat Islam dalam hal nikah dan talak, dan membasmi segala karakter ketimuran. Dengan kalimat singkat ; “melebur ke Barat”

Kedua, Ali Abdur-Raḥīq, dalam bukunya *Al Islam wa Ushul Al Hukm* (terbit 1925), menolak bila kekhalifahan, peradilan, atau jabatan-jabatan pemerintahan dan negara menjadi urusan agama, sekalipun hanya sebagian saja. Buku ini berhasil mempropagandakan dan memuluskan jalan bagi pemikiran sekuler.

Ketiga, Thaha Husain dalam bukunya *Mustaqbal Ats-Tsaqafah fi Mishra* (terbit tahun 1938) mempropagandakan beberapa prinsip diantaranya adalah:

- Membawa Mesir kepada peradaban barat dan memformat sesuai dengannya.
- Menegakkan nasionalisme dan masalah-masalah pemerintahan berdasar asas budaya, bukan agama.⁵⁰

4. Partai Wafd, yang mengadopsi idealisme Barat dalam pemikiran , sistem dan standar-standar legitimasi, dan partai-partai sempalannya (Al-Ahrar Ad-Dusturiyun, dsb.) serta koran-korannya. Artinya, dominasi pemikiran dan politik ada di tangan arus westernisasi menjelang kelahiran Ikhwanul Muslimin.

⁵⁰ Al Banna dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 160

Kekuatan dan dominasi arus ini menyebabkan berkobarnya rasa keIslaman dan mempengaruhi Hasan Al Banna dan kawan-kawannya sehingga ia mengatakan:

“tidak ada seorangpun yang mengetahui selain Allah, berapa malam kami lalui untuk memikirkan kondisi umat ini dan apa yang dialaminya di berbagai aspek kehidupan. Kami analisis penyakit-penyakitnya dan kami pikirkan terapinya. Karena keprihatinan yang sangat mendalam ini, kami pun hanyut hingga menangis”

Kondisi tersebut merupakan penyebab langsung yang mendorong dibentuknya Ikhwanul Muslimin. Dapat dikatakan bahwa berdirinya Ikhwanul Muslimin merupakan jawaban atas tantangan arus westernisasi seluler dan inkarnasinya, yang hidup dalam manajemen politik dan iklim pemikirannya. Bender menyebutkan bahwa Ikhwanul Muslimin berdiri sebagai protes terhadap sistem pemerintahan model barat, dan bahwa keberadaan barat serta kemenangan westernisasi di Mesir mendesak mereka untuk menentukan sikap yang tegas terhadap barat dan peradabannya.⁵¹

Hasan Al Banna menyatakan bahwa tugas organisasinya adalah menghadang gelombang otoriterisme peradaban materi. Singkatnya dominasi westernisasi di Mesir pada periode tersebut berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan Ikhwanul Muslimin.

⁵¹ Leonard Bender dalam Muiz Ruslan, 2000, hlm 160

c. Arus regionalisme (Propaganda Menuju Mesirisme)

1. Para propagandis arus ini adalah para propagandis arus westernisasi itu sendiri, khususnya Luthfi As-Sayid, Thaha Husain, dan salamah Musa. Arah pemikirannya adalah westernisasi, itu juga dan propaganda kepada Firaunisme dan ambisi menjadikan Mesir sebagai penyatu di antar mereka. Arus ini membatasi kultur Mesir dalam batas-batas regional yang sempit.
2. Ikhwanul Muslimin menantang arus ini dengan menegaskan afiliasi Arab dan Islam bagi Mesir, dan menjadikan konsepsi nasionalisme sebagai prinsip yang khas.

d. Arus Nasionalisme Arab

1. Anwar Jundi mengatakan bahwa munculnya nasionalisme di dunia Islam tidak bisa dipisahkan dari kaidah dasarnya yang bersumber dari Islam. Nasionalisme itu sendiri pada dasarnya adalah tantangan dari Barat. Sedangkan Al-Kawakibi menyeru kepada konsepsi Arabisme atas dasar pemikiran Islami.⁵²

Pemikiran nasionalisme arab ini mulai tampak jelas di Mesir dari tahun 1933 yang dalam banyak hal berbaur dengan pemikiran Islam (*fikrah Islamiyah*).

2. Pemikiran nasionalisme Arab di Mesir tersebar luas karena berbagai faktor, diantaranya:

⁵² Anwar Jundi, *al Yaqzhah fi Muwajahah Al-Isti'mar* dalam. Muiz Ruslan, 2000, hlm 161.

- Adanya tantangan imperialisme, munculnya persoalan Palestina dan Zionis.
- Terbentuknya beberapa organisasi yang mempropagandakan pemikiran Arabisme dan berusaha mendekatkan antar sesama bangsa Arab.
- Para pembela arus keagamaan mengadopsi konsepsi Arabisme dalam rangka menghadapi propaganda Mesirisme Firaunisme.
- Masuknya Mesir secara resmi ke medan gerakan Arab di tengah Perang Dunia II dan berdirinya Konfederasi Negara-Negara Arab yang menjadikan Kairo sebagai markasnya.

3. Arus ini mendapatkan “gema” yang menonjol pada Ikhwanul Muslimin. Mereka menyatakan bahwa kesatuan Arab merupakan sesuatu yang harus ada, wajib dibela dan diusahakan untuk mewujudkannya. Mereka juga membahas konsepsi Arabisme dan kesatuan Arab, juga melakukan kerja konkret yang membela kofederasi Arab dan persoalan-persoalannya.

e. Arus Westernisasi Komunis

1. Di Mesir mulai terbentuk kelompok-kelompok Marxis yang terdiri dari orang-orang asing, kaum Yahudi Rusia, dan sebagian orang-orang Mesir setelah terjadinya Revolusi Sosial di Rusia tahun 1917 dan terbentuknya Partai Sosialis Mesir pada tahun 1921, yang membawa bendera Marxisme. Arus ini banyak didominasi oleh unsur-unsur Yahudi. Setelah terjadi

- berbagai perpecahan, ia berubah menjadi Partai Komunis yang melakukan gerak secara langsung, hal ini yang menyebabkannya berbenturan dengan pemerintahan Sa'ad pada tahun 1924, dan memukul keras partai ini. Setelah kejadian ini, pemikiran Komunis disebarkan secara sembunyi-sembunyi.
2. Kepemimpinan gerakan komunis di Mesir secara total jatuh ke tangan Yahudi sebelum tahun 1948. Sesudah Perang Dunia II, terbentuklah berbagai kelompok komunis yang melakukan bermacam-macam kegiatan melalui perhimpunan, berupa berbagi klub dan ikatan kebudayaan.⁵³
 3. Pada tahun 40-an, Henri Coryel membentuk "Gerakan Mesir untuk Pembebasan Nasional" yang menyebabkan pemikiran sosialis menyebar luas di Mesir melalui buku-buku dan berbagai terbitan. Sedangkan Haniel Schwartz membentuk suatu organisasi yang memberikan peran besar dalam membentuk Komite Nasional Pelajar dan Pekerja, pada tahun 1946. kedua organisasi ini kemudian menyatu pada tahun 1947 dengan nama "Gerakan Demokrasi untuk Pembebasan Nasional". Pada tahun 1951, kaum komunis Mesir memimpin gerakan ini setelah lepas dari Schwartz dan Coryel.⁵⁴
 4. Dari situ jelas bahwa di Mesir telah muncul gerakan Sosialisme yang mengadopsi prinsip-prinsip Maxisme. Al-Bisyri melihat bahwa

⁵³ Rauf Abbas dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit.*, hlm 163

⁵⁴ Bisri dalam Muiz Ruslan, 2000, hlm 169

terbentunya organisasi-organisasi Sosialis ini merupakan salah satu dampak westernisasi.

5. Kaum komunis, sejak tahun 1945, mulai menghantam Ikhwanul Muslimin untuk menjauhkannya dari problema nasional; dengan menuduhnya fasis dan munafik dalam berpolitik. Ikhwanul Muslimin menjadi musuh bebuyutan kaum komunis. Anggota Ikhwanul Muslimin menanggapi secara intelektual dengan menekankan seruan keadilan sosial dan berbagai studi yang menolak komunisme, sedangkan secara praktek nyata dengan melakukan pendekatan lebih banyak kepada buruh.⁵⁵

Hasan Al Banna menyeru kelompok-kelompok komunis agar memahami Islam yang mengandung dasar-dasar reformasi yang jauh lebih tinggi dari pada mazhab komunis, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Raqiq.⁵⁶

C. Pemikiran Al Banna secara umum

Metodologi dakwah yang dijalankan oleh Hasan Al Banna memiliki ciri khas tersendiri dan karakter yang bermacam-macam.⁵⁷ Berikut adalah pokok-pokok pemikiran politik Al Banna, yang sekaligus berarti sosok Ikhwanul Muslimin yang digambarkan dalam pidatonya yang diberi judul *Risalah At-taalim*

⁵⁵ Richard B Michell dalam Muiz Ruslan 2000, *op.cit*, 163)

⁵⁶ Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 164.

⁵⁷ Anwar Al Jundi, 2003, *op.cit*, hlm 29

(risalah pengajaran). Dalam risalah taalim tersebut Al Banna menjelaskan sepuluh pilar sumpah anggota ikhwanul muslimin yaitu:⁵⁸

1. Pemahaman

Dalam penjelasan pilar pemahaman, Al Banna merinci menjadi beberapa point, point pertamanya berbunyi :

”Islam adalah tata aturan yang sempurna, yang meliputi segala aspek kehidupan. Islam adalah agama dan tanah air, pemerintahan dan bangsa, moral dan kekuasaan, rahmat dan keadilan, peradaban dan undang-undang. Islam adalah ilmu pengetahuan dan hukum, kekayaan material atau usaha dan harta, jihad dan dakwah atau kekuatan senjata dan konsep. Islam adalah aqidah dan ibadah yang shalih, satu dan yang lain saling melengkapi dan sederajat”

Poin kelima berbunyi :

”Pendapat imam (pemimpin) atau wakilnya tentang sesuatu yang tidak ada ketentuan (*nash*), masalah-masalah yang mengandung berbagai ikhtilaf dan tradisi umum, boleh dikerjakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* (syariat) yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist. Pendapat seperti ini bersifat relatif, yang suatu waktu dapat berubah sesuai dengan norma dan adat yang berlaku...”

Point kedelapan berbunyi :

”Perbedaan pendapat dalam masalah fikih (hukum) tidak boleh dijadikan sebab timbulnya perpecahan dalam bidang keagamaan, yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan saling benci-membenci. Setiap *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad karena memang dia mampu) akan memperoleh pahalanya masing-masing, dan tak seorangpun yang melarang usaha pembuktian ilmiah dalam masalah khilafiyah, sepanjang tetap bertujuan cinta kepada Allah, saling tolong menolong kepada kebenaran, tanpa adanya sikap fanatisme golongan yang tercela itu.”

⁵⁸ Almuzamil Yusuf, 2002, *op.cit*, hlm 58

Point selanjutnya berbunyi :

”kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang muslim yang telah berikrar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, beramal dengan kewajiban yang telah ditentukan kepadanya dan menunaikan segala perintahNya, walaupun ia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kecuali mereka yang betul-betul mengucapkan kata-kata kufur atau ingkar yang dapat ditentukan secara pasti oleh agama. Atau mereka yang mendustakan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan dengan cara yang tidak sesuai dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Al Quran (Arab), serta mereka yang melakukan perbuatan yang digolongkan sebagai kekufuran ”

2. Ikhlas

Pilar keikhlasan maksudnya, bahwa setiap muslim dalam perkataan dan perbuatannya, hanya bertujuan kepada ridho Allah semata. Dengan demikian mereka akan benar-benar menjadi pejuang ideologi dan *aqidah*, bukan berjuang untuk membela kepentingan pribadi.

3. Amal

Al Banna menjelaskan adanya tujuh tingkatan amal yang harus direalisasikan, sebagai buah dari pemahaman dan keikhlasan. Tujuan point tersebut adalah:

- a. Memperbaiki diri sendiri
- b. Pembentukan rumah tangga muslim
- c. Memperingatkan masyarakat, adalah terwarnainya segala aspek kehidupan dengan asas dan dasar Islam.

- d. Berjuang mencapai kemerdekaan, yakni memerdekakan negara dari segala macam bentuk kekuasaan asing non Islam, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun spiritual.
- e. Memperbaiki Pemerintahan, adalah memperbaiki hingga benar-benar bercorak Islam. Dikatakan bercorak Islam ketika aparaturnya terdiri dari orang-orang Islam yang taat kepada pemerintah Islam, menjauhi maksiat, serta melaksanakan hukum dan ajarannya.
- f. Mengembalikan kewibawaan Ummat Islam sedunia, dengan cara memerdekakan seluruh tanah air umat Islam, mengembalikan kemuliaannya, memadukan serta menyatukan peradabannya, untuk kemudian memobilisasinya guna mendirikan kembali Khilafah Islamiyyah yang telah hilang.
- g. Membimbing dunia, dengan cara menyebarkan ajaran-ajaran Islam keseluruh penjuru dunia, sehingga tidak ada fitnah terhadap Islam.

4. Jihad

Jihad merupakan kewajiban sampai akhir hayat. Tingkatan jihad adalah *pertama*, melawan dalam hati, *kedua*, jihad dengan lisan, tulisan dan perkataan yang benar (tegas) didepan penguasa yang jahat. Sedangkan tingkatan yang *ketiga* merupakan tingkatan tertinggi adalah berperang dijalan Allah.

5. Pengorbanan

Setiap anggota ikhwan harus siap mengorbankan nyawa, harta, waktu dan segala sesuatu dalam kehidupan demi tercapainya tujuan karena itu tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Al Banna mengutip surat At Taubah (9) ayat 111 :

”Sesungguhnya Allah telah membeli nyawa dan harta orang beriman, dengan balasannya adalah surga. Mereka berperang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh...”

Al Banna juga mengutip surat At Taubah ayat 24 yang isinya adalah, ”bahwa jika kaum muslimin menempatkan bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perdagangan, rumah, semua itu lebih dicintai dari ada Allah, rasul dan *Jihad fi sabilillah*, maka akan datang murka Allah”.

6. Taat

Taat adalah dengan melaksanakan perintah baik dalam keadaan senang atau sedih, mudah atau susah. Tuntutan untuk taat berbeda-beda terhadap objek dakwah, tergantung ada fase mana objek dakwah tersebut berada. Al Banna membuat tiga fase dakwah yaitu :

- a. Fase *tabligh* atau penyebaran gagasan, yakni menyebarkan *fikrah* (konsep) Islam kepada seluruh manusia. Maka setiap orang yang setuju dan ingin mengambil bagian dalam Ikhwanul Muslimin dipersilahkan. Mereka ini tidak dituntut ketaatan total, tapi

sekedar diminta untuk menghormati sistem dan peraturan jamaah saja.

- b. Fase *takwin* (formasi dan pengkaderan), mereka yang masuk dalam fase ini adalah hasil seleksi dari fase sebelumnya. Maka metode yang diterapkan disini adalah sufi secara spiritual dan material (siap dikomando) dalam hal operasional. Maka slogan yang dipakai adalah perintah dan taat
- c. Fase *tanfidz* (pelaksanaan atau eksekusi). Fase ini merupakan jihad terus-menerus untuk mencapai tujuan. Setiap orang yang berada dalam fase ini harus siap memikul beban dakwah dan siap untuk menanggung segala resiko.

7. Teguh

Keteguhan hati maksudnya tetap konsisten dalam perjuangan walau bertahun-tahun sampai bertemu dengan Allah. Konsekuensinya adalah menang atau mati *syahid*. Lalu Al Banna mengutip surat Al Ahzab (33) ayat 23:

”di antara kaum mu’minin itu ada orang yang telah menepati janjinya, diantara mereka itu ada yang telah gugur (*syahid*), ada pula yang tetap tegar menunggu (untuk *syahid*), mereka tidak sedikitpun merubah janjinya”.

8. Totalitas

Totalitas atau *tajjarud* maksudnya adalah bahwa setiap anggota Ikwanul Muslimin harus bersih aqidah dan idologinya dari segala macam doktrin dan kepentingan, kecuali yang datangnya dari Islam.

9. Persaudaraan

Persaudaraan atau *ukhuwah* yakni suatu ikatan persaudaraan karena persamaan aqidah, "kita semua adalah saudara seiman, maka perpecahan adalah kekufuran". Ikatan cinta yang paling rendah adalah *salamatusshodr* (bersih hati terhadap saudara seiman) dan yang paling tinggi adalah *itsar* (mendahulukan kepentingan saudara seiman daripada diri sendiri).

10. Saling percaya

Maksudnya adalah bahwa seorang anggota jamaah harus mentaati pemimpinnya apabila pemimpinnya menjalankan kewajiban. Dengan adanya saling percaya antara pemimpin dan prajurit, maka akan tampak kekuatan barisan jamaah. Salah satu bukti bahwa prajurit taat kepada pemimpinnya adalah siap menyatakan pendapat pribadinya yang salah dan pemimpin yang benar bila mereka ada dalam keadaan berbeda pendapat dalam hal yang tidak ada nash syar'i yang jelas.

Kesepuluh prinsip di atas, menurut Al Banna dapat dirangkum dalam lima kalimat : *Allohu ghoyatuna* (Allah adalah hakikat tujuan kami), *Ar-Rasulu Qudwatuna* (Rasulullah adalah teladan kami), *Al-Qur'anu Dusturuna* (Al Quran adalah undang-undang kami), *Al-Jihadu sabiiluna* (berjihad adalah jalan hidup kami), *Asy-Syahadatuna Ummiyyatuna*, atau *Al Mautu fi sabilillah asma amaniina* (mati di jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi).

Dari akar ideologis ini telah melahirkan beberapa implikasi ideologis yang menjadi kerangka pemikiran Hasan Al Banna (Risalah Mu'tamat Al Khamis dan Risalah Baina Al Amsi wa Al Yaum, dalam Abu Ridha 2004: 35-38), yaitu :

Pertama, universalitas Islam mengharuskan Islam menyentuh masalah-masalah politik. Oleh karena itu amal politik merupakan implikasi ideologis yang tidak mungkin terhindari. Ia mengatakan :

“sebagai hasil pemahaman yang komprehensif dan utuh tentang Islam dalam diri Ikhwanul Muslimin adalah fikrah mereka yang melingkupi seluruh aspek *ishlaahul ummah* (perbaikan ummat) dan tercermin dalam setiap unsur dari berbagai pemikiran dalam rangka perbaikan. Setiap *mushlih* (pembaru) yang ikhlas dan bersemangat tinggi akan memperoleh semua impiannya dalam fikrah ini. Dalam fikrah ini juga bertemu angan-angan para pecinta *ishlah* (perbaikan) yang mengerti dan memahami tujuannya. Kalian dapat mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah *hai'ah siyasiyah* karena mereka menuntut perbaikan dari dalam hukum pemerintahan, meluruskan persepsi yang terkait dengan hubungan umat Islam dengan bangsa-bangsa lain di luar negeri, mentarbiyah bangsa agar memiliki 'izzah dan menjaga identitasnya semaksimal mungkin” (Risalah Al Mu'tamar Al Khamis).

Kedua, *daulah* (negara) sebagai institusi politik utama dan memiliki otoritas dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum atau syariah, harus menjadi representatif *fikrah* (ideologi Islam). Sebab penerapan Islam sebagai *manhaj Al Hayah* (sistem hidup) yang sempurna hanya dapat ditegakkan secara utuh melalui sebuah *daulah* Islamiyah yang memiliki legalitas dalam menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mewujudkan kebaikan didunia dan kebahagiaan di akhirat. Hal itu setidaknya-tidaknya dapat dipahami melalui apa yang dinyatakan Hasan Al Banna berikut :

“menjadikan *daulah* sebagai sarana perwujudan dan pemeliharaan fikrah, bertanggung jawab mewujudkan sasaran-sasarannya di masyarakat, dan mentransformasikannya kepada sekalian manusia”...”agar tegak dinegara ini sebuah *daulah* islamiyah merdeka yang menerapkan hukum Islam, merealisasikan sistem sosialnya, mendeklarasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada semua manusia. Selama *daulah* ini belum tegak seluruh kaum muslimin bertanggung jawab dihadapan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mereka berdosa disebabkan pengabaian mereka untuk menegakkannya dan keengganan mereka untuk mewujudkannya.⁵⁹”

Ketiga, adanya kenyataan bahwa setiap muslim harus konsisten dalam merealisasikan Islam sebagai *manhaj al hayah* (sistem hidup). Artinya setiap muslim harus tampil dalam penerapan nilai-nilai Islam . Ia tidak boleh mengelak dari kewajiban itu. Hasan Al Banna menegaskan keterlibatan gerakan dalam *siyasah* (politik) lahir dari pemahanan yang benar terhadap Islam serta penerapan yang akurat terhadap *manhajnya* (pedoman). Ia menyatakan :

“wahai saudaraku...! Kami bukan politikus yang mendukung salah satu partai politik dan menentang partai yang lain. Tidak ada seorangpun yang dapat membuktikan bahwa kami terlibat dalam aktivitas politik seperti itu. Adapun kalau kami dikatakan politikus, dalam arti kami memiliki perhatian terhadap umat kita, kami yakin bahwa kekuatan *tanfidziyah* termasuk bagian dari ajaran dan hukum Islam. Kami meyakini bahwa kebebasan siasah dan kehormatan nasionalisme adalah bagian dari rukun dan kewajiban (menegakkan) Islam. Atau karena kami berjuang untuk menyempurnakan kemerdekaan dan memperbaiki badan pemerintahan, maka memang demikianlah kami. Kami kira kami tidak mendatangkan hal-hal yang baru. Kesemuanya itu adalah hal-hal yang biasa dipahami oleh setiap muslim yang mempelajari Islam dengan benar. Apa yang kami lakukan tidak lain merealisasikan tujuan-tujuan diatas dan kami tidak akan keluar dari dakwah Islam sama sekali, karena tidak hanya menyuruh umatnya untuk berjuang dan berjihad.⁶⁰”

⁵⁹ Banna Al Amsi wa Al Yaum

⁶⁰ Risalah Al Mu'tamar Al Khamis.

Keempat, keharusan ummat menuntut pemerintahannya agar menerapkan hak-hak ke Islamannya. Oleh sebab itu Hasan Al Banna mendorong umat agar menuntut pemerintah yang mengurus urusannya menerapkan hak-hak *siasah* ke Islamannya.

“dalam kaitan ini ada ada satu hal yang ingin saya katakan bahwa Ikhwanul Muslimin belum melihat suatu pemerintahan sekarang yang dapat mengemban amanah dan menunjukkan kesiapan untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Masyarakat hendaknya memahami hal ini dan menuntut kepada pemerintah untuk mendapatkan hak-hak keislamannya. dan selama ini ikhwan telah bekerja untuk itu.”⁶¹

Kelima, penyadaran dan penyebaran dakwah serta perjuangan konstitusi merupakan *wasilah* (sarana) bagi tegaknya Islam dan Islamisasi masyarakat. Proses penyadaran dan penyebaran dakwah serta perjuangan konstitusi dalam konteks umat merupakan individual dan kolektif. Untuk itu Hasan Al Banna menilai bahwa setiap gerakan Islam, dalam mencapai tujuan gerakannya, harus konsisten dengan penyebaran dakwah dengan hikmah dan *maw'izhah hasanah* (cara dan ketauladanan yang baik) serta keterlibatan langsung dalam kehidupan *siasah*. Ia menegaskan:

“Adapun sarana dan cara yang kita pakai secara umum adalah memberikan kemantapan dan menyebarkan dakwah dengan berbagai sarana, sehingga dapat dipahami oleh opini umum dan didukungnya atas dasar akidah dan ian. Kemudian penyeleksian pribadi-pribadi yang baik untuk menjadi pendukung dakwah yang kokoh dan fikrah islah ini. Juga perjuangan konstitusional agar dakwah ini memiliki suara di lembaga legislatif dan didukung oleh kekuatan eksekutif. Dengan dasar ini calon-calon ikhwan akan maju, dan apabila datang waktu yang tepat akan tampil

⁶¹ *Ibid*

mewakili umat di DPR. Percayalah dengan pertolongan Allah, selama tujuan kita adalah mencari rida-Nya.⁶²

Keenam, pemerintahan sebagai pelaksana hukum. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya pemerintahan merupakan salah satu pilar tegaknya Islam. Tegaknya sebuah pemerintahan yang islami adalah tuntutan ideologis *syumuliyatul* (kesempurnaan) Islam. Konsekuensinya semua gerakan Islam harus konsern dengan masalah pemerintahan. Hasan Al Banna dalam menjelaskan sikap ikhwan terhadap pemerintahan menegaskan :

“Islam yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin menjadikan pemerintahan merupakan salah satu rukun (tegaknya) Islam. Di dalamnya terkandung tuntutan pelaksanaan selain bimbingan. Usman bin Affan berkata, “sesungguhnya Allah pasti mencabut dengan kekuasaan apa yang tidak dapat dicabut oleh Al Quran. “Rasulullah saw. telah mewajibkan pemerintahan sebagai salah satu sendi Islam sementara hukum pemerintahan itu sendiri dalam kitab-kitab fiqh Islam masuk dalam masalah-masalah *ushul* (pokok), bukan masalah-masalah *furu* (cabang) dan buku-buku yang bersifat *ushul*. Islam adalah hukum pemerintahan dan pelaksanaan sekaligus.”⁶³

Dari keenam kerangka pemikiran Hasan Al Banna diatas, dapat disimpulkan bahwa Politik dan Islam harus teraplikasi dalam kehidupan bernegara.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

D. Metode Pembaharuan Hasan Al Banna

Metode pembaharuan yang dilakukan Al Banna adalah dengan *tarbiyah* (pembinaan/pendidikan). Dengan *tarbiyah*, ia memulai misinya dan mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. dari sinilah ia memulai melakukan pembaharuan riil yang komprehensif untuk setiap bidang kehidupan politik dan sosial.⁶⁴

Titik permulaan metode hasan Al Banna adalah mengenali hukum alam atau sunatullah terhadap makhlukNya, yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh Allah untuk setiap makhlukNya, bahwa syarat pertama dari perubahan problematika yang terjadi pada suatu umat adalah dengan jalan mengubah apa yang terjadi pada diri mereka sendiri, sehingga Allah akan memperbaiki masalah yang terdapat pada mereka.⁶⁵ Dalam pesan muktamar yang ke-5 Al Banna mengatakan "jangan melawan hukum alam, akan tetapi tundukkan, fungsikan, arahkan arusnya, dan gunakan sebagian untuk kepentingan sebagian yang lain". Hal ini dimaksudkan bahwa cara berinteraksi dengan hukum-hukum alam, dari segi pengenalan, penyelesaian, dan penggunaannya harus dipandang sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan segala proses perubahan dan perkembangan sosial harus berdasarkan pada hal-hal tersebut.

Pondasi ini adalah akidah dan keimanan agama. Berangkat dari inilah Al Banna menekankan pemikirannya tentang urgensitas peran agama didalam proses perubahan dan penentuan bidang serta sarana-sarana perubahan yang pokok. Praktik empirik yang dilakukan Al Banna dirangkum dalam tiga babak perubahan

⁶⁴ Fathi Yakan. 1998, *op.cit*, hlm 27

⁶⁵ *Ibid*, hlm 28

yaitu: *pertama*, menyeru pemusatan perubahan dan *islah* (perbaikan) para pribadi. *Kedua*, memusatkan perubahan dan perbaikan pada keluarga sebagai kelanjutan dari yang pertama. *Ketiga*, perbaikan mencakup seluruh masyarakat (Yakan, Fathi. 1998: 30). Kemudian dasar agama Islam sebagai faktor yang aktif dan efektif untuk menciptakan perubahan dalam diri seorang individu. Jika yang dimaksud dengan kerusakan jiwa adalah akhlak yang bobrok, perilaku yang menyimpang dan dekadensi moral, maka sesungguhnya kunci untuk mengubahnya tidak lain kecuali faktor agama. Menurut Al Banna, agama adalah:

”menghidupkan jiwa dan memberikan pada setiap diri suatu pengontrol atau filter yang tidak pernah lalai dan senantiasa mendorongnya untuk berbuat baik dengan sangat kuat. Agama akan membuat seorang petani bersemangat di kebunnya, membuat seorang tukang las bahagia di bengkelnya, membuat anak kecil rajin belajar di meja belajarnya, membuat seorang ilmuwan merasakan asyik dalam melakukan risetnya, membuat seorang filosof menemukan kemuliaan dengan pemikirannya pada setiap renungan analisisnya”⁶⁶

Penekanan Al Banna terhadap pentingnya tarbiyah berangkat dari pengaruh warisan sufi yang dimilikinya dan sebagian dari aktivitasnya di pengajian tarikat-tarikat yang mempunyai kerangka pandangan organisatoral dan agenda-agenda pembentukan kader. Sumber-sumber inspirasi metode gerakannya tidak terbatas dari hal ini saja, tetapi juga pelajaran dari pengalaman gerakan-gerakan pembaharuan kontemporer untuk perubahan secara islami. Terhadap pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang merupakan murid dari Jalaluddin Al Afghani, Al Banna mengkaji dan melakukan evaluasi terhadap konsep mereka yang belum terwujud karena waktu yang terbatas. Al banna mendukung dasar pemikirannya yang berpijak pada pentingnya independensi

⁶⁶ *Ibid*, hlm 31

pembinaan generasi dan pendidikan dari rezim pemerintahan untuk menjaga terpengaruhnya tarbiyah dari kekacauan kehidupan politik dan juga intervensi asing.

Disamping kegiatan tarbiyah, Al Banna secara sinkron senantiasa menekankan peran para penguasa dan wakil-wakilnya dalam memberikan kontribusi terhadap proses perubahan dan *Islah*. Al Banna berpendapat bahwa pemerintah yaitu kekuasaan eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan resmi yang harus memberikan kontribusi. Seruan dan kritik Al banna kepada para penguasa, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, adalah untuk mengajak mereka melaksanakan proses perubahan dan *islah*. Keyakinannya akan pentingnya peran penguasa dalam perubahan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada gerakan politiknya yang mencakup masalah demonstrasi kekuatan, koalisi, dan pengaturan konfrontasi yang terjadi dalam panggung politik.

Dakwah tersebut tidaklah dimulai dari masjid, melainkan dari kedai-kedai minuman. Sasarannya adalah mereka yang masih berada diluar masjid, yang masih terlena dengan permainan kehidupan. Sistem ini memberikan pengaruh yang cukup berarti. Dengan sistem tersebut, banyak orang menjadi sadar dan bergabung bersamanya.